
**PENGARUH PENERAPAN E-SPT PPN DAN SOSIALISASI E-SPT PPN
TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN E-SPT PPN PADA PENGUSAHA
KENA PAJAK**

Indra Pahala

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Email: pahala.indra@gmail.com

Santi Susanti

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Email: sanppm@gmail.com

Maulida Azhari Putri

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Email: maulida.azhariput@gmail.com

ABSTRACT: Issues raised in this study is there any influence between the application of e-SPT VAT and Socialization of e-SPT VAT Against Efficiency Charging of e-SPT VAT partially and simultaneously.

The purpose of this study is to obtain empirical evidence on the influence of the implementation of e-SPT VAT and socialization of e-SPT VAT to the charging efficiency of e-SPT VAT EJIP Zone Area South Cikarang. This research is expected to contribute to the Taxable Person to want to apply the modern administrative system in Indonesia at this time, so that the tax system in Indonesia will be able to more easily and efficiently.

Keywords: Implementation of e-SPT VAT, Socialization e-SPT VAT, the charging efficiency of e-SPT VAT.

ABSTRAKSI: Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah ada pengaruh antara penerapan e-SPT PPN dan Sosialisasi e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian e-SPT PPN parsial dan simultan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh penerapan e-SPT PPN dan sosialisasi e-SPT PPN untuk efisiensi pengisian e-SPT PPN EJIP Zona Lokasi Selatan Cikarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pengusaha Kena ingin menerapkan sistem administrasi modern di Indonesia saat ini, sehingga sistem pajak di Indonesia akan dapat lebih mudah dan efisien.

Kata kunci: Penerapan e-SPT PPN, Sosialisasi e-SPT PPN, efisiensi pengisian e-SPT PPN.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti dikutip dari salah satu artikel Info Bank News dengan judul "Penerimaan Pajak Meningkat per Tahun Sejak 2006" , ([http:// www.infobanknews.com/2011/09/penerimaan-pajak-meningkat-174-per-tahun-sejak-2006/](http://www.infobanknews.com/2011/09/penerimaan-pajak-meningkat-174-per-tahun-sejak-2006/), diakses pada tanggal 23 Maret 2014) yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak meningkat 17,4% per tahun sejak 2006. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan target penerimaan pajak tahun 2011 sebesar Rp.878,7 triliun. Bila dibandingkan dengan penerimaan pajak 2006 yang sebesar Rp.409,2 triliun, maka rata-rata peningkatannya sebesar 17,4% per tahun. Dengan adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, mendorong Ditjen Pajak untuk terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.

Oleh karena itu, DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*)

yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Dengan diadakannya aplikasi yang menunjang bagi wajib pajak dalam pengisian SPT secara elektronik ini juga harus disertai dukungan sistem informasi dan teknologi yang kuat dari pihak DJP. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi apabila aplikasi tersebut digunakan.

Berdasarkan paparan-paparan diatas dan melihat hasil penelitian sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT khususnya e-SPT PPN, untuk mengetahui sejauh mana efisiensi pengisian e-SPT PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN serta sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DJP terhadap penerapan aplikasi tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan e-SPT PPN dan Sosialisasi e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian e-SPT PPN pada Pengusaha Kena Pajak di Area Kawasan EJIP Cikarang Selatan”**.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Efisiensi Pengisian e-SPT PPN (Y)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efisien yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan/menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya, dan mampu menjalankan dengan tepat dan cermat; berdayaguna; tepat guna.

Menurut Pandiangan, Liberti (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2009:270) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Dalam pengisian e-SPT PPN harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan baik oleh DJP maupun yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Efisiensi pengisian e-SPT PPN adalah melakukan

pengisian e-SPT PPN secara benar sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. (Lingga, 2012)

Penerapan e-SPT PPN (X1)

Tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) melalui perusahaan penyedia aplikasi diatur dalam surat keputusan Direktur Jendral Pajak nomor: KEP-06/PJ./2009 tanggal 20 Januari 2009. Setiap wajib pajak (Orang Pribadi maupun Badan) dapat melakukan e-SPT dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
- b. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
 - 1) Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan;
 - 2) Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH);
 - 3) Faktur Pajak;
 - 4) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;
 - 5) Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), kode Akun, dan jumlah pembayaran pajak;
- c. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT;
- d. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
- e. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;
- f. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;
- g. Wajib Pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
- h. Wajib Pajak Menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir, dan melalui *e-filing*.

Sosialisasi e-SPT PPN (X2)

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan, maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Susanto (2012) dalam www.pajak.go.id menyatakan bahwa upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat.

Dampak dari adanya beberapa perubahan dalam undang-undang perpajakan mengharuskan Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan sosialisasi perpajakan dan juga turut membantu masyarakat dalam memahami peraturan pajak terbaru. Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memahami sistem dan peraturan pajak terbaru. (Aini, 2013)

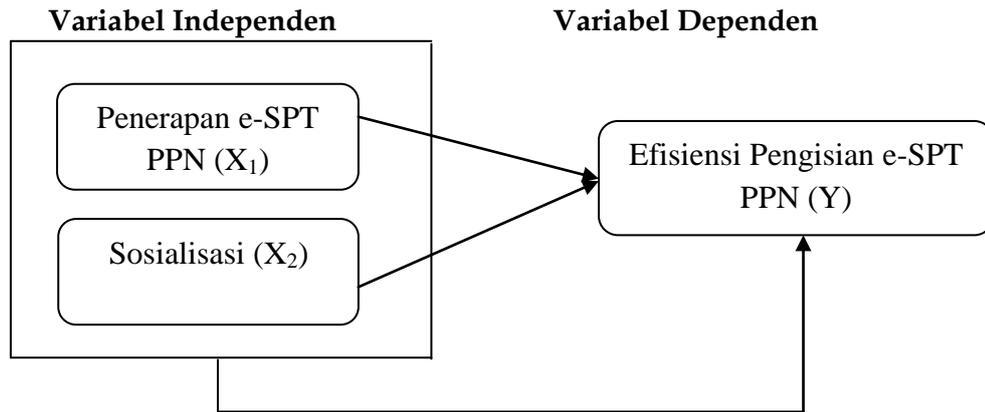
Pengembangan Hipotesis

Pajak menjadi tulang punggung pendapatan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan kehidupan bangsa ini. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi dan adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas layanan perpajakan yang diberikan selama ini. Oleh karena itu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan, hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah sedemikian canggih.

Reformasi administrasi tersebut diikuti dengan terciptanya fasilitas-fasilitas baru dalam perpajakan. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah elektronik SPT (e-SPT) merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Adalah penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para Wajib Pajak mengenai peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam hal pemrosesan data perpajakan dengan diterapkannya sistem SPT digital karena secara tidak langsung, hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil.

Jika menurut persepsi para Wajib Pajak penerapan e-SPT PPN selama ini bermanfaat dalam proses pengisian SPT maka penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN sehingga pengisian e-SPT PPN menjadi lebih efisien (Lingga, 2012). Selain Wajib Pajak, peran yang terpenting adalah bagaimana pihak Ditjen Pajak menginformasikan terkait penerapan aplikasi e-SPT PPN yaitu dengan cara sosialisasi yang perlu dilakukan kepada para wajib pajak. Sehingga informasi yang diberikan Ditjen Pajak melalui sosialisasi kepada para wajib pajak dapat diterima dan di aplikasikan ke dalam aplikasi e-SPT dengan baik. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengisian e-SPT PPN oleh para Wajib Pajak.



Berdasarkan kerangka pemikiran dan asumsi di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN.
- H₂ : Sosialisasi e-SPT PPN berpengaruh terhadap pengisian e-SPT PPN.
- H₃ : Penerapan e-SPT PPN dan sosialisasi e-SPT PPN secara simultan berpengaruh terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN.

METODE

Dalam penelitian kali ini yang menjadi objek penelitian yaitu Area Kawasan EJIP (*East Jakarta Industrial Park*) Cikarang Selatan. Yang menjadi kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu para Pengusaha Kena Pajak yang sudah menerapkan aplikasi e-SPT PPN. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan data primer dimana peneliti langsung menyebarkan kuesioner yang berisikan pernyataan yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Kuesioner tersebut diberikan kepada masing-masing responden dalam penelitian ini yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berada di area EJIP Cikarang Selatan.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2007:58) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Hal ini selaras dengan Arikunto (2010:161), variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen. Agar penelitian ini terarah maka perlu ditentukan variabel-variabel berdasarkan hipotesis yang akan diteliti. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X) adalah tipe variabel lain yang menjelaskan atau memengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo,2002:64). Data informasi yang menjadi variabel bebas atau

independent adalah Penerapan e-SPT PPN (X_1) dan sosialisasi e-SPT PPN (X_2). Indikator variabel ini adalah:

- 1) Indikator Penerapan e-SPT PPN (X_1):
 - a. Urgensi diterapkannya sistem e-SPT.
 - b. Tujuan penerapan sistem e-SPT.
 - c. Kendala dalam penerapan e-SPT. (Lingga, 2012)
 - 2) Indikator Sosialisasi e-SPT PPN (X_2):
 - a. Penyuluhan.
 - b. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat.
 - c. Informasi langsung dari petugas kepada wajib pajak.
 - d. Pemasangan *billboard*.
 - e. *Website* Ditjen Pajak. (Ditjen Pajak dalam Oktavianie, 2013)
2. Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2002:64). Data informasi yang menjadi variabel dependen adalah efisiensi pengisian e-SPT PPN. Indikator variabel ini adalah:
- a. Kecepatan.
 - b. Keakuratan.
 - c. Efisiensi Ruang Penyimpanan/Pengarsipan. (Lingga, 2012)

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini didasarkan pada model yang sudah umum digunakan yaitu skala Likert karena teknik yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif menjadi suatu urutan dan data kuantitatif adalah dengan teknik *Summate Rating Method Likert Scale*. Pengukuran skala ini dilakukan dengan cara menetapkan bobot, kemudian menambahkan untuk mendapatkan suatu jumlah dari masing-masing indikator yang hendak diukur.

Teknik Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

Data memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai pembuktian hipotesis. Kuesioner sebagai instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel.

Untuk mengungkapkan variabel-variabel yang diteliti, diperlukan alat ukur atau skala yang valid dan dapat diandalkan (*reliable*) agar kesimpulan penelitian tidak salah dan tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya maka variabel penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitasnya.

a. Uji Validitas

Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tersebut semakin mengenai pada sarannya. Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode *Pearson Product Moment* dengan bantuan SPSS.

b. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya terhadap butir-butir pertanyaan yang dinyatakan valid uji keandalannya, bersifat *ajeg*, stabil dan konsisten. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran artinya pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama akan memberikan hasil yang sama dengan beberapa kali pengukuran selama aspek yang diukur tidak berubah (Kuncoro,2003:154).

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian regresi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk menentukan apakah dapat dilakukan uji regresi atau tidak. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, dan uji multikolinearitas. Menurut Ghozali (2009:147) model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Adapun dua cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2009:107).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah pengujian untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel independen, jika terjadi korelasi antara variabel independen maka hal ini berarti terdapat multikolinieritas dan persamaan regresi ganda yang akan terbentuk tidak dapat digunakan untuk peramalan. Menurut Ghozali (2009 : 95) uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan *linear* antar variabel independen dalam model regresi. Untuk itu diperlukan pengujian ini untuk melihat apakah terdapat multikolinieritas pada suatu persamaan regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian untuk melihat apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Suatu model regresi yang baik harus bebas dari masalah heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2009 : 125) uji heteroskedastisitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan lainnya.

3. Analisis Regresi

Regresi berganda berguna untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2009:13).

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terkait (variabel dependen). Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + B_1 X_1 + B_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen (efisiensi pengisian e-SPT PPN)
- X₁ = Variabel independen (penerapan e-SPT PPN)
- X₂ = Variabel independen (sosialisasi e-SPT PPN)
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- e = Error

Untuk menganalisis pengaruh variabel Penerapan e-SPT PPN (X₁) dan Sosialisasi e-SPT PPN (X₂) terhadap Efisiensi Pengisian e-SPT PPN (Y) digunakan metode statistik dengan tingkat taraf signifikan $\alpha = 0,05$ artinya angka derajat kesalahan 5%.

4. Uji Hipotesis

Untuk mendapatkan jawaban dari suatu penelitian, maka perlu diadakan pengujian terhadap hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang masih bersifat praduga dan harus diuji kebenarannya. Untuk itu setiap hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini perlu diuji kebenarannya.

a. Uji t

Menurut Ghozali (2009:17) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Cara melakukan uji t dapat dengan membandingkan nilai t statistik dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t-tabel, maka menerima hipotesis yang menyatakan suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009:16).

c. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1 ($0 < R^2 < 1$). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. (Ghozali, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN.

Berdasarkan hasil dari jumlah pernyataan yang mendapat nilai tertinggi untuk variabel penerapan e-SPT PPN, yaitu dengan adanya e-SPT PPN ini mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT. Berdasarkan pernyataan tersebut artinya bahwa hampir semua responden menjawab sangat setuju untuk pernyataan tersebut, yang berarti bahwa para Pengusaha Kena Pajak merasa dengan adanya e-SPT PPN ini sangat membantu mereka dalam melaporkan SPT ke KPP, karena di nilai lebih efisien dan mudah. Hal tersebut juga dikatakan bahwa tujuan penerapan e-SPT ini sudah dapat dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang sudah menerapkan aplikasi e-SPT PPN.

Sedangkan dari hasil jumlah pernyataan yang mendapatkan nilai terendah untuk variabel penerapan e-SPT PPN, yaitu dengan adanya e-SPT PPN ini Wajib Pajak bisa mendapatkan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus. Hal tersebut mendapatkan nilai terendah berarti bahwa para Pengusaha Kena Pajak merasa dengan adanya e-SPT PPN ini mereka tetap belum bisa mendapatkan data yang cepat dan benar-benar akurat dari pihak fiskus. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan dari fiskus kepada wajib pajak dinilai masih kurang dalam penerapan e-SPT PPN ini.

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN. Semakin tinggi penerapan e-SPT PPN maka semakin tinggi pula efisiensi pengisian e-SPT PPN. Agar penerapan e-SPT PPN dapat benar-benar secara menyeluruh sebaiknya pihak DJP dapat melakukan berbagai cara untuk menarik para PKP agar mau memakai aplikasi e-SPT PPN. Cara tersebut dapat dimulai dari meminimalisir kendala-kendala dalam penggunaan aplikasi e-SPT PPN ini, agar PKP merasa nyaman menggunakan aplikasi ini karena dapat benar-benar mengetahui dan ikut merasakan manfaat dari penggunaan aplikasi e-SPT PPN ini.

Apabila penerapan e-SPT PPN ini berjalan semakin baik yang berarti bahwa apabila penerapan e-SPT PPN semakin meningkat maka akan membawa kemajuan bagi sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu sistem *self assessment* dimana para wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang akan dibayarkan, dan apabila sistem *self assessment* berjalan dengan baik maka pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pun akan semakin meningkat. Selain itu juga berarti bahwa sistem pengendalian internal dalam hal penerapan e-SPT PPN ini juga dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, sehingga hal-hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi pengisian e-SPT PPN.

Pengaruh sosialisasi e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN.

Berdasarkan hasil dari jumlah pernyataan yang mendapat nilai tertinggi untuk variabel sosialisasi e-SPT PPN, yaitu kurangnya sosialisasi e-SPT PPN akan menghambat pengetahuan wajib pajak yang menggunakan aplikasi ini. Sosialisasi e-SPT PPN ini bertujuan untuk mengenalkan kepada PKP mengenai aplikasi e-SPT PPN yang sudah

diterapkan oleh DJP, sehingga apabila sosialisasi kurang maka akan berpengaruh pula terhadap tingkat pengguna aplikasi e-SPT PPN ini, sehingga PKP tidak mengetahui atau belum terlalu mengerti apa manfaat dari aplikasi e-SPT PPN ini dan hal itu pula yang akan mempengaruhi efisiensi pengisian e-SPT PPN nantinya.

Sedangkan dari jumlah pernyataan yang mendapatkan nilai terendah untuk variabel sosialisasi e-SPT PPN yaitu, Pihak DJP sudah memasang *billboard*/spanduk di tempat yang strategis terkait dengan perlunya penggunaan aplikasi e-SPT PPN. Berdasarkan pernyataan tersebut yang memiliki nilai terendah berarti menunjukkan bahwa pihak DJP belum secara menyeluruh melakukan sosialisasi e-SPT PPN ini, baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut juga dapat menyebabkan tidak berkembangnya pengetahuan para Pengusaha Kena Pajak mengenai adanya aplikasi e-SPT PPN ini.

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN. Karena nilai dari hasil empiris menandakan nilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa apabila sosialisasi e-SPT PPN meningkat maka efisiensi pengisian e-SPT PPN menurun, atau sebaliknya apabila efisiensi pengisian e-SPT PPN meningkat maka sosialisasi e-SPT PPN akan menurun.

Berdasarkan bukti empiris yang telah peneliti dapatkan dari responden, menunjukkan bahwa dari beberapa responden dapat dilihat ada penyimpangan dalam skor kuesioner yang didapat dalam waktu yang bersamaan. Seperti pada responden nomor 6 yang mendapat total skor tertinggi dalam variabel sosialisasi e-SPT PPN, namun dalam waktu yang bersamaan juga mendapat skor terendah pada variabel efisiensi pengisian e-SPT PPN. Termasuk juga dengan responden nomor 8 dan 23. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden merasa sudah mendapatkan sosialisasi yang baik dan dapat diterima dari pihak DJP maupun KPP, namun disaat bersamaan juga responden merasa dalam pengisian e-SPT PPN masih terdapat kesalahan-kesalahan seperti *human error* sehingga menyebabkan pengisian e-SPT PPN ini dinilai belum efisien.

Pengaruh Penerapan e-SPT PPN dan Sosialisasi e-SPT Terhadap Efisiensi Pengisian e-SPT PPN.

Berdasarkan hasil pengujian simultan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengisian e-SPT PPN dan sosialisasi e-SPT PPN secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN dalam penelitian ini hipotesis ketiga (H_3) diterima. Dengan pengaruh sebesar 21,7% terhadap variabel dependen dan sisanya adalah pengaruh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Hal ini berarti masih ada faktor lainnya yang mempengaruhi efisiensi e-SPT PPN, seperti kemudahan dalam perekaman data, keamanan data, atau kemudahan pemakaian e-SPT. Efisiensi pengisian e-SPT PPN berarti bahwa para PKP harus mengisi e-SPT PPN secara benar dan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh DJP. Dengan mengadakan

penerapan e-SPT PPN dan sosialisasi e-SPT PPN dapat membantu DJP dalam rangka meningkatkan efisiensi pengisian e-SPT PPN.

Penerapan e-SPT PPN yang telah dicanangkan oleh DJP sejak beberapa tahun belakangan memiliki tujuan untuk mempermudah para PKP dalam mengisi, melapor, dan menghitung SPT sendiri dalam bentuk elektronik. Hal ini memaksa PKP untuk selalu aktif untuk mendapatkan informasi-informasi perpajakan yang terbaru terkait dengan sistem yang baru ini. Namun tindakan PKP tersebut kurang efektif jika tidak dibarengi dengan kebijakan DJP dalam mensosialisasikan setiap informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu maka hal-hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi pengisian e-SPT PPN, dimana apabila penerapan e-SPT PPN semakin baik dan bagus maka akan mempengaruhi efisiensi pengisian e-SPT PPN. Begitu pula dengan sosialisasi e-SPT PPN yang dapat mempengaruhi efisiensi pengisian e-SPT PPN. Bahwa apabila sosialisasi yang dilakukan DJP kepada PKP semakin baik dan merata maka efisiensi pengisian e-SPT PPN akan berpengaruh, karena semakin banyak PKP yang mengetahui manfaat dan bagaimana cara penggunaan aplikasi e-SPT PPN maka akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi apabila PKP menggunakan aplikasi tersebut sehingga pengisian e-SPT PPN akan lebih efisien.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian dapat disimpulkan bahwa semakin meratanya sosialisasi e-SPT PPN yang dilakukan oleh DJP maka akan semakin meluas pula penerapan e-SPT PPN yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan keduanya akan berpengaruh juga terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN. Apabila Pengusaha Kena Pajak telah melakukan sosialisasi e-SPT PPN dari DJP maka efisiensi dalam pengisian e-SPT PPN pun akan semakin meningkat. Kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dilakukan oleh para PKP maupun KPP dalam pengisian e-SPT PPN dapat diminimalisir sehingga dapat lebih efisien dalam pengisian e-SPT PPN.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara penerapan e-SPT PPN dan sosialisasi e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN. Sampel penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang telah menggunakan e-SPT PPN yang ada di Area Kawasan EJIP Cikarang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan e-SPT PPN memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN. Hal ini berarti bahwa semakin banyak Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT PPN maka akan meningkatkan efisiensi dalam pengisian e-SPT PPN.
2. Sosialisasi e-SPT PPN berpengaruh negatif terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi e-SPT PPN yang dilakukan oleh DJP maka akan menurunkan efisiensi dalam pengisian e-SPT PPN. Berdasarkan hasil empiris yang didapatkan oleh peneliti hal tersebut terjadi karena responden merasa

sosialisasi e-SPT PPN ini sudah baik dan dapat dipahami, namun apabila terdapat kendala-kendala terutama dalam kendala *human error* kebanyakan responden belum benar-benar paham apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam pengisian e-SPT PPN tersebut sehingga hal ini menyebabkan efisiensi yang menurun.

3. Penerapan e-SPT PPN dan sosialisasi e-SPT PPN berpengaruh secara simultan terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa apabila para Pengusaha Kena Pajak semakin banyak yang menggunakan aplikasi e-SPT PPN, sosialisasi e-SPT PPN yang dilakukan oleh DJP semakin baik, jelas, dan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh DJP maupun Undang-Undang maka akan berpengaruh terhadap efisiensi dalam pengisian e-SPT PPN.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kali ini, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1) Bagi Peneliti

- a) Pada penelitian ini, responden yang dijadikan sampel hanya berasal dari Area Kawasan EJIP Cikarang Selatan, dimana dalam kawasan tersebut hanya terdapat sedikit perusahaan. Sehingga kurang bisa menggambarkan kondisi sistem perpajakan di Indonesia secara keseluruhan. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel dengan memperluas populasi yang akan diteliti.
- b) Hasil dalam penelitian ini memiliki *adjusted R-squared* yang dapat dikatakan rendah. Hal ini berarti masih terdapat banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN namun tidak terdapat di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, seperti sistem informasi atau kemudahan pemakaian e-SPT PPN. Karena di lihat dari penelitian ini, erat kaitannya dengan sistem informasi yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak yang dinilai belum cukup baik dari segi informasi dalam pengoperasian e-SPT PPN sehingga seharusnya aplikasi e-SPT PPN ini dibuat dengan lebih mudah lagi.

2) Bagi Praktisi

- a) Bagi petugas Pajak, diperlukan adanya sosialisasi e-SPT PPN yang lebih baik, jelas dan merata ke berbagai wilayah serta menyesuaikan tata bahasa yang lebih mudah untuk dipahami dan materi dapat disampaikan dengan jelas, agar Pengusaha Kena Pajak yang mendapatkan materi sosialisasi e-SPT PPN dapat benar-benar memakai ilmu yang sudah disampaikan oleh pemateri saat bersosialisasi sehingga dalam pengisian e-SPT PPN akan lebih efisien.
- b) Bagi Pengusaha Kena Pajak, diharapkan agar mau berkontribusi dalam memajukan perpajakan di Indonesia, dengan cara membayar pajak dengan jujur dan ikut melaksanakan peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan dari pihak DJP maupun yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Caroline dan Siti, *Analisis Aplikasi e-SPT PPN pada Kantor Konsultan Pajak Maily Palembang*. Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang: Palembang.
- Direktur Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro Petrus. 14 Maret 2014. "Pengguna Layanan Pelaporan SPT Online Masih Rendah". Online.
Tersedia: (<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/03/14/194519>) (diakses 23 Maret 2014)
- Direktur Peraturan Perpajakan I, Awan Nurmawan Nuh. 6 November 2013. "Genjot Penerimaan Pajak, Administrasi PPN dibenahi". Online.
Tersedia: (<http://news.detik.com/read/2013/11/06/000000/2402248/794/genjot-penerimaan-pajak-administrasi-ppn-dibenahi?991101mainnews>) (diakses 23 Maret 2014)
- Falerian, *Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Manado*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi: Manado
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi ke-4. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handyaningrat, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Ita, 2012. *Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya*. Jurnal Akuntansi vol.4 no.1. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha: Bandung.
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S. Brodjonegoro. 12 September 2011. "Penerimaan Pajak Meningkat 17,4% per Tahun Sejak 2006". Online. Tersedia: (<http://www.infobanknews.com/2011/09/penerimaan-pajak-meningkat-174-per-tahun-sejak-2006/>) (diakses 23 maret 2014)
- KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran on-line dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital.
- Mar'at. 1984. *Sikap Manusia : Perubahan Serta Pengukurannya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi XVI- Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.
- Oktavianie, 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal EMBA Vol 1 No 3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi: Manado.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana. 2012. FE Universitas Negeri Jakarta: Jakarta.
- Pegawai KP2KP Moh. Amin. 3 Juli 2013. "Penerimaan e-SPT pada KP2KP dan Permasalahannya". Online. Tersedia: (<http://www.pajak.go.id/blog-entry/kp2kpduri/penerimaan-e-spt-pada-kp2kp-dan-permasalahannya>) (diakses tanggal 23 Maret 2014)
- PER-6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik
- Qurrotul, 2013. *Peran Sosialisasi Perpajakan Terhadap Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya Wonocolo)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya: Surabaya.
- Sekaran, Uma. 2012. *Research Method for Business*. 4th edition. John Willey, New York.
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.